



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TA.2021**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.18 TELEPON (0532) 21195

PER AGUSTUS 2021



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 050/ 23 /Bapp-VI/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta terbitnya beberapa peraturan/kebijakan Pemerintah Pusat yang harus di tindaklanjuti, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
34. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian

Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 161);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
46. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9);
47. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari :

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
3. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
4. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. *Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah;*
9. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
10. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
12. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
14. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
15. Perubahan Renja Dinas Sosial;
16. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan;
19. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
20. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
21. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
23. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
24. Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
25. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
27. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
28. Perubahan Renja Dinas Perikanan;
29. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
30. Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
31. Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
32. Perubahan Renja RSUD Sultan Imanuddin;
33. Perubahan Renja Kecamatan Arut Selatan;
34. Perubahan Renja Kecamatan Arut Utara;
35. Perubahan Renja Kecamatan Kumai;
36. Perubahan Renja Kecamatan Kotawaringin Lama;
37. Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Lada;
38. Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng;

- KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



The official stamp of the Bupati of Kotawaringin Barat is a circular emblem. It features a central Garuda (mythological bird) with its wings spread, perched on a banner that reads 'KOTA BUN'. The outer ring of the stamp contains the text 'BUPATI KOTAWARINGIN BARAT' at the top and 'KOTAWARINGIN BARAT' at the bottom, separated by stars. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

NURHIDAYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang baik, Transparan, Akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat kebijakan dibidang belanja selama 1 (satu) tahun, merupakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah disusun ini berdasarkan hasil evaluasi dan telaahan terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa pertengahan tahun 2021 (triwulan II) untuk mengakomodasi kebutuhan riil dalam program dan kegiatan, sesuai dengan maksud dan tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini disampaikan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor : 050/304/Bapp-VI/2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan bahan seperlunya.

Pangkalan Bun, Agustus 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB.KTW.BARAT**



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19650802 199403 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II TAHUN 2020	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II TAHUN 2020.....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	17
BAB IV PENUTUP.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan kerangka acuan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu Kepala Daerah terpilih berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah khususnya pada Tahun 2021, dimana program dan kegiatan yang direncanakan merupakan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan / kapasitas keuangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamatkan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan Renja agar dapat diselaraskan dan disesuaikan secara substantif dan normatif.

Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program dan kegiatan yang ditampung dalam suatu Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja Perubahan ini juga harus mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 06);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMD) ;
27. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
28. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 mengenai Penyesuaian Pagu Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
30. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/23/Bapp-VI/2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2021;
31. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

▪ Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara internal maupun eksternal yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahunan oleh masing-

masing bagian dan bidang yaitu bagian sekretariat, bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan ormas serta bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

- **Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah untuk :

- a. Mewujudkan kesamaan sikap, pandangan dan komitmen bersamaguna memberikan yang terbaik bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik,sesuai dengan visi misi kepala daerah, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.
- b. Agar perencanaan kegiatan dan program lebih terarah dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dalam mengalokasikan anggaran (penganggaran) sehingga dapat mengoptimalkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dokumen Perubahan RenjaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Tahun Berkenaan (Triwulan II)

BAB III.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 (Triwulan II)

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan capaian Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 ada beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan dikarenakan Rasionalisasi dan realokasi/refocusing anggaran untuk meningkatkan kapasitas terkait penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/*sosial safety net* yang dibutuhkan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan pandemi Covid-19, selain itu juga adanya pergeseran anggaran antar kegiatan guna mengoptimalkan capaian kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun 2021 yang berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan II menjadi tolok ukur dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan-SKPD) Tahun 2021.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun 2021 dilihat pada lampiran *Tabel* berikut.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II
Tahun Anggaran 2020

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-1)	Target Kinerja Renja Tahun 2021 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021 (Tahun n)		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indikator Program: Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-	100%	50%	50	50%	50
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	-	27 Dokumen	15 Dokumen	55,56	15 Dokumen	55,56
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	-	8 Dokumen	6 Dokumen	75	6 Dokumen	75
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	19 Dokumen	-	19 Dokumen	9 Dokumen	47,37	9 Dokumen	47,37

		Indikator Program. Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	-	100%	50%	50	50%	50%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	515 Dokumen	-	515 Dokumen	254 Dokumen	49,32	254 Dokumen	49,32
8.01.01.2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	14 Dokumen	-	14 Dokumen	8 Dokumen	57,14	8 Dokumen	57,14
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	500 Dokumen	-	500 Dokumen	245 Dokumen	49	245 Dokumen	49
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	200
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	-	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Program. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	100 % 2 Jenis	- -	100 % 2 Jenis	50 % 1 Jenis	50 50	50 % 1 Jenis	50 50
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	5 Stel	-	5 Stel	- Stel	0	- Stel	0
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	2 Orang/kali	1 Orang/kali	2 Orang/kali	1 Orang/kali	50	2 Orang/kali	100

		Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-	100%	50%	50	50%	50
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	4 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100	4 Jenis	100
8.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	6 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	11 Jenis	220
8.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 Jenis	20 Unit/buah	40 Jenis	39 Jenis	97	59 Jenis	147,50
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang disediakan	46915 lembar	50200 lembar	46915 lembar	26176 lembar	55	76376 lembar	162,79
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	18 OK	31 org/kali	18 OK	9 OK	50	40 OK	222,22
		Indikator Program: Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	100%	0%	0	0%	0
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Aparatur yang Disediakan	1 Jenis	-	1 Jenis	- Jenis	0	- Jenis	0
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	-	1 Unit	- Unit	0	- Unit	0
		Indikator Program: Persentase Pemenuhan	100%	-	100%	50%	50	50%	50

8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	100
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50	18 Bulan	150
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50	30 Bulan	250
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	-	100%	50%	50	50%	50
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 Unit	3 Unit/thn	8 Unit	6 Unit	75	9 Unit	112,50
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	15 Unit	14 Unit	9 Unit	64,28	24 Unit	171,42
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	29,05%	-	29,05%	25,43%	87	25,43%	87

8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama dan pemuda-pemudi/pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa Perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	400 orang	-	400 orang	300 orang	75	300 orang	75
8.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama	50 orang	6 orang	50 orang	- orang	0	6 orang	12
8.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Seiarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan Revolusi Mental dan Bela Negara	-	-	-	-	-	-	-
8.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Seiarah Kebangsaan	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	350 orang	300 orang	350 orang	300 orang	85,71	600 orang	171,42
8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta rapat koordinasi persiapan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

8.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	-	-	-	-	-
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik	Presentase Pemahaman Politik Masyarakat	20,52%	-	20,52%	14%	68,22	14%	68,22
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisai/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik	130 Orang	-	130 Orang	50 Orang	38,46	50 Orang	38,46
8.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisai/penyuluhan politik masyarakat	100 orang	42 orang	100 orang	50 orang	50	92 orang	92
8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Parpol	30 orang	-	30 orang	- orang	0	- orang	0

	Situasi Politik Di Daerah								
8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan/Hibah Kepada Partai Politik	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	- Kegiatan	0	- Kegiatan	0
8.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Poldagri	-	-	-	-	-	-	-
							-		
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase organisasi dan lembaga masyarakat yang terbina	58%	-	58%	0%	0	0%	0
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	140 orang	-	140 orang	- orang	0	- orang	0
8.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	140 Orang	-	140 Orang	- Orang	0	- Orang	0

8.01.04.2.01.04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-
8.01.04.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monev Ormas dan LSM	3 Laporan	-	3 Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0
							-		
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	8 Instansi	-	8 Instansi	4 Instansi	50	4 Instansi	50
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	51 kegiatan	-	51 kegiatan	25 kegiatan	49,01	25 kegiatan	49,01
8.01.06.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	3 Laporan	20	18 Laporan	120
8.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33	1 Kegiatan	33,33

	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(Forum Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)							
8.01.06.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	48 Kegiatan	36 Kegiatan	48 Kegiatan	24 Kegiatan	50	60 Kegiatan	125

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 memerlukan beberapa perubahan dan pergeseran pada program/ kegiatan/ sub kegiatan baik pergeseran anggaran, maupun penambahan/ pengurangan target kinerja dalam rangka mencapai hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan.

Adapun pagu belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dapat dilihat pada *Tabel* berikut dibawah ini :

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2021					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021					Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									6.218.771.000					6.976.131.535		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3.957.761.900					3.842.704.395		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									75.576.000					73.458.950		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	8 Dokumen	72 Nilai Skor	37.005.400	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	8 Dokumen	72 Nilai Skor	36.253.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	19 Dokumen	72 Nilai Skor	38.570.600	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	19 Dokumen	72 Nilai Skor	37.205.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.509.915.397					3.349.543.200		
8	01	01	2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	14 Dokumen	100%	3.462.836.597	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	14 Dokumen	100%	3.305.837.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kab. Kotawaringin Barat	100%	500 Dokumen	100%	43.858.600	Kab. Kotawaringin Barat	100%	500 Dokumen	100%	41.350.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	1 Laporan	100%	3.220.200	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	1 Laporan	100%	2.355.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								23.840.000					13.530.000	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan nya yang diadakan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Kotawaringin Barat	100%	5 Stel	100%	3.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	100%	5 Stel	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Kotawaringin Barat	100%	2 Orang/Kali	100%	20.840.000	Kab. Kotawaringin Barat	100%	1 Orang/Kali	100%	10.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								134.606.026					167.760.543	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	5 Jenis	100%	2.499.475	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	5 Jenis	100%	1.757.063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	40 Jenis	100%	22.679.393	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	40 Jenis	100%	29.178.622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penggandaan yang disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	46915 Lembar	100%	19.977.158	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	26937 Lembar	100%	12.984.858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	18 OK	100%	89.450.000	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	24 OK	100%	123.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4.947.492					23.041.249	

8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Kotawaringin Barat	100%	1 Unit	100%	4.947.492	Kab. Kotawaringin Barat	100%	3 Unit	100%	23.041.249	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								179.186.965					179.186.965		
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	12 Bulan	100%	64.319.540	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	12 Bulan	100%	64.319.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	100%	12 Bulan	100%	114.867.425	Kab. Kotawaringin Barat	100%	12 Bulan	100%	114.867.425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								29.690.020					36.183.488		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	8 Unit	100%	19.693.020	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	8 Unit	100%	26.186.488	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat	100%	14 Unit	100%	9.997.000	Kab. Kotawaringin Barat	100%	14 Unit	100%	9.997.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan								562.436.200					386.234.580		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								562.436.200					386.234.580		

8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama	Prosentase Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Kab. Kotawaringin Barat, Pangkalan Banteng	29,05%	50 Orang	100%	359.094.650	Kab. Kotawaringin Barat	29,05%	60 Orang	100%	179.894.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Seiarah Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	Prosentase Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Kotawaringin Barat, Kumai	29,05%	350 Orang	100%	203.341.550	Kotawaringin Barat, Kumai	29,05%	370 Orang	100%	206.339.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik							1.359.327.890					1.331.894.810		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							1.359.327.890					1.331.894.810		
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase Pemahaman Politik Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan politik masyarakat	Prosentase Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan n Etika serta Budaya Politik	Kab. Kotawaringin Barat, Kumai, Pangkalan Lada	20,52%	100 Orang	100 %	45.169.700	Kab. Kotawaringin Barat, Pangkalan Lada	20,52%	50 Orang	100 %	22.584.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase Pemahaman Politik Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Parpol	Prosentase Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan n Etika serta Budaya Politik	Kab. Kotawaringin Barat	20,52%	30 Orang	100 %	8.978.190	Kab. Kotawaring in Barat	20,52%	20 Orang	100 %	6.164.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan darr Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase Pemahaman Politik Masyarakat	Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan/ Hibah Kepada Partai Politik	Prosentase Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan n Etika serta Budaya Politik	Kab. Kotawaringin Barat	20,52%	1 Kegiatan	100 %	1.305.180.000	Kab. Kotawaring in Barat	20,52%	1 Kegiatan	100 %	1.303.145.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	04			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							63.209.010					15.137.200		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							63.209.010					15.137.200		
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin n Lama, Pangkalan Lada	58%	140 Orang	100 %	47.390.410	-	58%	- Orang	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	Jumlah laporan hasil Monev Ormas dan LSM	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng	58%	3 Laporan	100 %	15.818.600	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada	58%	2 Laporan	100 %	15.137.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial								276.036.000					1.400.160.550		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								276.036.000					1.400.160.550		
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	Prosentase Kerjasama dengan Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	8 Instansi	15 Laporan	100 %	35.438.300	Kab. Kotawaringin Barat	8 Instansi	15 Laporan	100 %	13.891.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Prosentase Kerjasama dengan Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	8 Instansi	3 Kegiatan	100 %	24.599.000	Kab. Kotawaringin Barat	8 Instansi	3 Kegiatan	100 %	1.124.520.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Prosentase Kerjasama dengan Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	8 Instansi	48 Kegiatan	100 %	215.998.700	Kab. Kotawaringin Barat	8 Instansi	48 Kegiatan	100 %	261.748.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL SEBELUM													6.218.771.000	TOTAL SESUDAH				6.976.131.535	

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (Tahun berjalan)												SKPD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									6.218.771.000	6.976.131.535	757.360.535			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indikator Program: Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Program: Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	3.957.761.900	3.842.704.395	(115.057.505)			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan dan Penggangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Politik	Perencanaan dan Penggangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Politik	Kab. Kotawaringi n Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringi n Barat, Arut Selatan	27 Dokumen	27 Dokumen	75.576.000	73.458.950	(2.117.050)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Perencanaan dan Penggangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Politik	Perencanaan dan Penggangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Politik	Kab. Kotawaringi n Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	8 Dokumen	8 Dokumen	37.005.400	36.253.600	(751.800)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Perencanaan dan Penggangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Politik	Perencanaan dan Penggangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Politik	Kab. Kotawaringi n Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	19 Dokumen	19 Dokumen	38.570.600	37.205.350	(1.365.250)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100% 515 Dokumen	100% 515 Dokumen	3.509.915.397	3.349.543.200	(160.372.197)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyedia gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Jumlah dokumen penyedia gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	14 Dokumen	14 Dokumen	3.462.836.597	3.305.837.000	(156.999.597)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	500 Dokumen	500 Dokumen	43.858.600	41.350.850	(2.507.750)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	1 Laporan	1 Laporan	3.220.200	2.355.350	(864.850)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	100% 2 Jenis	100% 2 Jenis	23.840.000	13.530.000	(10.310.000)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	5 Stel	5 Stel	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.01.2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	2 Orang/Kali	1 Orang/Kali	20.840.000	10.530.000	(10.310.000)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	100%	134.606.026	167.760.543	33.154.517	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	5 Jenis	5 Jenis	2.499.475	1.757.063	(742.412)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0 2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	40 Jenis	40 Jenis	22.679.393	29.178.622	6.499.229	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang disediakan	Jumlah penggandaan yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	46915 Lembar	26937 Lembar	19.977.158	12.984.858	(6.992.300)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	18 OK	24 OK	89.450.000	123.840.000	34.390.000	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan Prasarana Aparatur yang Disediakan	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan Prasarana Aparatur yang Disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	100%	100%								
								1 Jenis	1 Jenis	4.947.492	23.041.249	18.093.757	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	1 Unit	3 Unit	4.947.492	23.041.249	18.093.757	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100%	100%			-					
								2 Jenis	2 Jenis	179.186.965	179.186.965	-	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	12 Bulan	12 Bulan	64.319.540	64.319.540	-	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	12 Bulan	12 Bulan	114.867.425	114.867.425	-	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Indikator Program: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas	Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	100% 2 Jenis	100% 2 Jenis	29.690.020	36.183.488	- 6.493.468	APBD	APBD Perubahan	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas	Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan	8 Unit	8 Unit	19.693.020	26.186.488	6.493.468	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas	Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	14 Unit	14 Unit	9.997.000	9.997.000	-	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda-Pemudi dan Pelajar di Kab.Ktw.Barat	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda-Pemudi dan Pelajar di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	29,05%	29,05%	562.436.200	386.234.580	(176.201.620)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama dan pemuda-pemudi/pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa Perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama dan pemuda-pemudi/pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa Perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	Tokoh Masyaraka, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda-Pemudi dan Pelajar di Kab.Ktw.Barat	Tokoh Masyaraka, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda-Pemudi dan Pelajar di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	400 Orang	430 Orang	562.436.200	386.234.580	(176.201.620)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama	Tokoh Masyaraka, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda-Pemudi dan Pelajar di Kab.Ktw.Barat	Tokoh Masyaraka, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda-Pemudi dan Pelajar di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Pangkalan Banteng	Kab. Kotawaringin Barat	50 Orang	60 Orang	359.094.650	179.894.780	(179.199.870)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	Tokoh Masyaraka, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda-Pemudi dan Pelajar di Kab.Ktw.Barat	Tokoh Masyaraka, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda-Pemudi dan Pelajar di Kab.Ktw.Barat	Kotawaringin Barat, Kumai	Kotawaringin Barat, Kumai	350 Orang	370 Orang	203.341.550	206.339.800	2.998.250	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik	Presentase Pemahaman Politik Masyarakat	Presentase Pemahaman Politik Masyarakat	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	20,52%	20,52%	1.359.327.890	1.331.894.810	(27.433.080)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisai/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik	Jumlah peserta sosialisai/ penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	130 Orang	70 Orang	1.359.327.890	1.331.894.810	(27.433.080)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan politik masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan politik masyarakat	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Kumai, Pangkalan Lada	Kab. Kotawaringin Barat, Pangkalan Lada	100 Orang	50 Orang	45.169.700	22.584.850	(22.584.850)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Parpol	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	30 Orang	20 Orang	8.978.190	6.164.960	(2.813.230)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan darr Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan/Hibah Kepada Partai Politik	Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan/Hibah Kepada Partai Politik	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Masyarakat dan Anggota Parpol di Kab.Ktw.Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.305.180.000	1.303.145.000	(2.035.000)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM	Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	58%	58%	63.209.010	15.137.200	(48.071.810)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM	Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM	Kab. Kotawaringi n Barat	Kab. Kotawaringi n Barat	140 Orang	- Orang	63.209.010	15.137.200	(48.071.810)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM	Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM	Kab. Kotawaringi n Barat, Kotawaringi n Lama, Pangkalan Lada	-	140 Orang	- Orang	47.390.410	-	(47.390.410)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monev Ormas dan LSM	Jumlah laporan hasil Monev Ormas dan LSM	Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM	Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM	Kab. Kotawaringi n Barat, Kotawaringi n Lama, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada	3 Laporan	2 Laporan	15.818.600	15.137.200	(681.400)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kab. Kotawaringi n Barat	Kab. Kotawaringi n Barat	8 Instansi	8 Instansi	276.036.000	1.400.160.550	1.124.124.550	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	51 Kegiatan	51 Kegiatan	276.036.000	1.400.160.550	1.124.124.550	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	15 Laporan	15 Laporan	35.438.300	13.891.950	(21.546.350)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	24.599.000	1.124.520.600	1.099.921.600	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	51 Kegiatan	51 Kegiatan	276.036.000	1.400.160.550	1.124.124.550	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	15 Laporan	15 Laporan	35.438.300	13.891.950	(21.546.350)	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	24.599.000	1.124.520.600	1.099.921.600	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.06.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	48 Kegiatan	48 Kegiatan	215.998.700	261.748.000	45.749.300	APBD	APBD Perubahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-----------------	---	---	---	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------	----------------	-----------------------------------

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai bahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 disusun sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dengan tujuan target kinerja dapat tercapai dengan optimal. Terima kasih.

Pangkalan Bun, Agustus 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KAB. KTW. BARAT**



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19650802 199403 1 010

LAMPIRAN



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Badan kesbangpol* Diterima Tgl : *25 feb. 2021*
No. Surat : *~* No. Agenda : *104*
Tgl. Surat : *18 Jan. 2021* Sifat :
☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : *Mohon persetujuan penambahan anggaran untuk*
Instansi vertikal dalam rangka cipta kondisi
wilayah kab. kab. kab.

Diteruskan kepada Sdr :

- ☐ Wakil Bupati
☐ Sekretaris Daerah
☐ Asisten Pemerintahan & Kesra
☐ Asisten Perekonomian & Pemb.
☐ Asisten Administrasi Umum
☐ Staf Ahli Bidang
☐ Kepala Dinas / Badan *BKAD*

Dengan Hormat, Harap :

- ☐ Teliti, Saran & Pertimbangan
☐ Proses Lebih Lanjut
☐ Untuk diselesaikan
☐ Untuk Diketahui / File

Catatan :

Ditanggungjawabkan melalui Dana pembangunan Th. 2021

22/2-2021
[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195
PANGKALAN BUN 74111

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Bupati Kotawaringin Barat.
Dari : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
Tanggal : 18 Januari 2021.
Perihal : **Mohon Persetujuan penambahan anggaran untuk Intansi Vertikal dalam rangka cipta kondisi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.**

Dasar : 1. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat ke 5 (lima) yaitu "mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis".
2. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
3. Hasil Koordinasi Plt. Kaban Kesbangpol Kobar dengan Bupati Kotawaringin Barat hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 di Ruang Kerja Bupati Kotawaringin Barat.

Pertimbangan : 1. Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan Instansi Vertikal (*Polres Kobar, Kodim 1014 Pbn, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Sub Denpom X-II Pangkalan Bun*) untuk menjaga kemandirian dan ketertiban Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan operasional bagi Intansi Vertikal tersebut dalam melakukan patroli keamanan cipta kondisi di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Anggaran yang tersedia untuk Tahun Anggaran 2021 Rp. 189.840.000,- (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Delatus Empat Puluh Ribu Rupiah*), dengan rincian untuk sebagai berikut :
a. Polres Kobar sebesar Rp. 63.840.000,-
b. Kodim 1014/Pbn sebesar Rp. 63.840.000,-
c. Lanud Iskandar P.Bun sebesar Rp. 36.960.000,-
d. Sub Denpom X-II P Bun sebesar Rp. 25.200.000,-
3. Anggaran untuk Instansi Vertikal (*Polres Kobar, Kodim 1014 Pbn, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Sub Denpom X-II Pangkalan Bun*) Tahun Anggaran 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 204.000.000,- (*Dua Ratus Empat Juta Rupiah*) dari pagu awal sebelum rasionalisasi yaitu Rp. 306.000.000,- (*Tiga Ratus Enam Juta Rupiah*).

Usul / Saran : 1. Sesuai arahan Bupati Kotawaringin Barat agar ditambahkan anggaran tersebut di atas sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), masuk pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik (8.01.06.2.01.05) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penutup : Demikian disampaikan mohon persetujuan dan petunjuk dari Ibu Bupati Kotawaringin Barat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

**PIH. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
NIP. 19630219 199303 1 004